



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIDA NIRWANA KRISTIANA
2. Jabatan : ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3. NHK : 450451

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 780.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/144 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 286 m2/140 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 136.000.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI KLX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 174.165.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 218.440.214

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.308.605.214

III. HUTANG Rp. 312.577.521

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 996.027.693

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.